



Penggunaan Teknologi di Era Digitalisasi: Strategi Dinas Perempuan dan Anak Meningkatkan Pelayanan Publik di Era 5.0

Nova Arini Stevia Yusuf¹, Chelsy Naristya Adiesti Utomo²

^{1,2} Universitas Negeri Semarang

Abstrak

Received: 07 Juni 2024

Revised: 14 Juni 2024

Accepted: 21 Juni 2024

Public administration burden refers to a number of administrative tasks or responsibilities, procedures and regulations faced by a government institution or agency in carrying out its functions and duties, one of which is public services. The research we conducted focused on discussing the administrative burden in public services carried out at the Women's and Children's Department. Using a method focus on qualitative descriptive analysis and a normative juridical approach. The aim of the research is to identify and analyze the administrative burden faced by the relevant agencies and evaluate their impact on service effectiveness. The research method involves collecting qualitative data through interviews, observations, and print and digital media sources. The research results show that the administrative burden in this service involves the complexity of regulations that influence the service processes carried out by the Women and Children Service. Descriptive analysis reveals the challenges faced by public servants in carrying out administrative duties, while a normative juridical approach is used to evaluate consistency with applicable regulations. The results of this research provide insight into the administrative burden faced by the relevant agencies and the effectiveness of services provided by the Women and Children Service. It is hoped that the implications of this research will be the basis for increasing administrative effectiveness in order to improve the quality of services in the public sector.

Keywords: *Administrative Burden, Public Services, Protection of Women and Children*

(*) Corresponding Author: novasteviaa@students.unnes.ac.id

How to Cite: Yusuf, N. A. S., & Utomo, C. N. A. (2024). Penggunaan Teknologi di Era Digitalisasi: Strategi Dinas Perempuan dan Anak Meningkatkan Pelayanan Publik di Era 5.0. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12555400>

PENDAHULUAN

Pelayanan merujuk pada serangkaian kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara individu dengan individu lainnya atau dengan mesin secara fisik, dengan tujuan menyediakan kepuasan kepada pelanggan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan dijelaskan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan hal, cara, atau hasil dari tindakan melayani³. Pemberian layanan kepada masyarakat terkait kebutuhan dan tuntutan untuk mencapai kesejahteraan pada dasarnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Tugas utama pemerintahan dapat disimpulkan menjadi tiga fungsi pokok dalam implementasinya, yaitu *service, empowerment,*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES), Email: novasteviaa@students.unnes.ac.id

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES), Email: chelsynaristya@students.unnes.ac.id

³ Sinambela, Lukman. 2014. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara



dan *development*. Memberikan layanan umum kepada masyarakat merupakan salah satu tugas utama pemerintahan yang sangat penting. Oleh karena itu seringkali organisasi pemerintah disebut sebagai *Public Servant*. Dalam kenyataannya, tidak semua aparat pemerintah atau administrator pemerintahan sepenuhnya memahami makna pentingnya pelayanan. Pelayanan mencakup serangkaian kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi melalui interaksi langsung antara individu dengan individu lainnya atau dengan mesin secara fisik, dengan tujuan memberikan kepuasan kepada pelanggan.

Berkaitan dengan pelayanan publik, dalam konteks hukum administrasi negara juga mengenal apa itu beban administrasi negara. Dalam konteks hukum administrasi negara, "beban administrasi" merujuk pada segala tugas, tanggung jawab, atau prosedur administratif yang harus dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan atau individu dalam rangka melaksanakan kebijakan publik. Beban administrasi ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti persyaratan pengajuan dokumen, proses perizinan, pelaporan, atau tindakan administratif lainnya yang diperlukan untuk mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku. Beban administrasi dapat menjadi suatu isu dalam hukum administrasi negara ketika proses administratif tersebut dianggap terlalu rumit, lambat, atau memberatkan bagi individu atau entitas yang terlibat. Peningkatan beban administrasi dapat mengakibatkan efisiensi yang rendah, biaya yang tinggi, dan mungkin juga dapat mempengaruhi hak hak individu atau organisasi yang terlibat. Rendahnya tingkat pelayanan yang diterima oleh masyarakat dan kurangnya pemahaman pemerintah akan urgensi layanan sejauh ini sebenarnya mencerminkan kurangnya tanggung jawab dari aparat pemerintahan. Padahal, tanggung jawab merupakan elemen kunci untuk memastikan pelaksanaan layanan publik yang berkualitas. Kehadiran suatu negara beserta lembaga lembaga, seperti pemerintahan atau pemegang kekuasaan negara lainnya, pada dasarnya bertanggung jawab sesuai amanah hasil kesepakatan antara masyarakat dan negara. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya memiliki tekad untuk melaksanakan tugas utama sesuai dengan apa yang telah disetujui.

Dalam era 5.0, di mana teknologi seperti kecerdasan buatan, *internet of things*, dan teknologi terkini lainnya semakin memainkan peran kunci, penting bagi Dinas Perempuan dan Anak untuk mengadopsi strategi yang inovatif dalam meningkatkan pelayanan publik. Artikel ini bertujuan untuk menggali pendekatan strategis yang dapat digunakan oleh instansi tersebut untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi.

Dinas Perempuan dan Anak Jawa Tengah memainkan peran yang krusial dalam perlindungan, pemberdayaan, dan pengembangan perempuan serta anak-anak di wilayah Jawa Tengah. yang melatar belakangi tentang pembentukan dinas ini adalah semuanya berawal dari Bagian Pemberdayaan Perempuan yang berada pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Bidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah, maka sesuai tuntutan keadaan, berubah menjadi Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, sedangkan pelaksana keluarga berencana dikoordinasikan oleh Biro Pemerintahan, yang merupakan unsur staf dan dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006. Kemudian, PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah mengamanatkan agar Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan

dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Lembaga Teknis Daerah, maka selanjutnya dibentuk Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tanggal 6 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah terbentuklah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. Serta visi dari Dinas Perempuan dan Anak Jawa Tengah adalah Berdikari dan Semakin Sejahtera *Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*. Juga dengan misinya untuk Membangun Masyarakat Jawa Tengah yang Religius, Toleran dan Guyub Untuk Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, Memperluas Reformasi Birokrasi Melalui Penguatan Koordinasi Dengan Pemerintah Kabupaten / Kota. Mengurangi Kemiskinan Dan Pengangguran Dengan Memperkuat Basis Ekonomi Rakyat Dan Membuka Ruang Usaha Baru. Menjadikan Rakyat Jawa Tengah Lebih Sehat, Lebih Pintar, Lebih Berbudaya, Dan Mencintai Lingkungan dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak-anak.

Dinas Perempuan dan Anak Jawa Tengah merupakan Dinas koordinator yang membawahi 35 Dinas Perempuan di seluruh kota dan kabupaten Jawa Tengah. Dinas Dinas di 35 kota dan kabupaten tersebut merupakan tangan pertama yang menangani seluruh permasalahan sehingga Dinas Perempuan dan Anak Jawa Tengah sebagai lembaga rujukan yang mengatasi permasalahan secara lanjut. Namun, dalam hal ini terdapat adanya kekurangan yang menjadikan sebuah kendala yaitu merupakan kurangnya rasa prioritas pada Dinas pada daerah daerah.

Pengupayaan Dinas Perempuan dan Anak Jawa Tengah dalam menanggulangi permasalahan nya adalah dengan memanfaatkan penggunaan teknologi yang masa kini menjadi hal yang optimal dalam perkembangannya. Dinas Perempuan dan Anak menganggap bahwasannya penggunaan teknologi dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan Dinas Perempuan dan Anak.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan metodologi deskriptif kualitatif dengan fokus pada analisis yuridis normatif. Penelitian yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Provinsi Jawa Tengah atau biasa disebut juga dengan Dinas Perempuan dan Anak memiliki tujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang praktik pelayanan publik di dalamnya. Metode penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui berbagai proses observasi, wawancara, dan sumber media cetak maupun digital Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan dan praktik dalam dinas ini sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Selama proses penelitian, peneliti berusaha untuk mendapatkan wawasan mengenai beban administrasi yang mungkin dihadapi oleh dinas dalam menjalankan tugasnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan signifikan dalam pemahaman terhadap

tantangan dan potensi solusi yang berkaitan dengan administrasi publik di konteks tersebut. Implikasi praktisnya dapat membantu dinas dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan meminimalkan beban administratif yang mungkin menghambat pencapaian tujuan dinas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tanggungjawab Dinas Perempuan dan Anak Dalam Melaksanakan program Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan layanan bagi warga negara dan penduduk. Ini mencakup penyediaan barang, jasa, dan atau layanan administratif sesuai dengan peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan publik⁴. Pelaku pelayanan publik dilakukan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan juga setiap orang yang berada dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau seluruh kegiatan tindakan pelayanan publik untuk memenuhi pelayanan yang ditujukan kepada seluruh warga negara secara langsung ataupun tidak langsung. Tugas yang dilakukan oleh pelayanan publik bagi setiap lembaga pemerintah yang mengimplementasikan pelayanan publik secara efektif dan berkualitas dipengaruhi oleh konsep dasar yang dibangun melalui reformasi birokrasi, mencapai tata kelola dan sistem pengelolaan yang profesional. Tingkat profesionalitas dalam bekerja, dengan memanfaatkan sepenuhnya potensi sumber daya manusia yang berkompeten dan berdaya saing, berdampak positif pada kualitas kinerja. Kinerja kinerja ini terkait erat dengan kemampuan dan soft skill yang dimiliki oleh setiap aparatur pemerintah, yang secara menyeluruh mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan⁵. Salah satu dinas pelayanan publik yang menjadi objek penulisan mengenai beban administrasi dilakukan di Dinas Perempuan dan Anak.

Perempuan secara etimologis berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu kata *empu*. Istilah *empu* merujuk pada sebuah gelar kehormatan yang mencerminkan kedudukan sebagai tuan, dihormati, dan dimuliakan. Dalam konteks terminologis, perempuan dapat diartikan sebagai individu yang patut dihormati, dimuliakan, dan dihargai. Konsep ini diperkuat dengan penambahan frasa *empu jari* yang mengacu pada penguatan jari agar tetap kokoh meskipun tanpa ujung jari yang lengkap⁶. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana memiliki beberapa fungsi utama dalam menjaga dan mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama perempuan dan anak. Upaya pemberdayaan perempuan yang dilakukan untuk dapat membantu kemampuan dan konsep diri kaum perempuan melewati proses pendidikan sehingga hal ini dapat

⁴ Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat.

⁵ Hayat, S. (2023). *Manajemen Pelayanan Publik*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

⁶ Siti Zahrok dan Ni Wayan Suarmini, "Peran perempuan dalam keluarga," *IPTEK Journal of Proceedings Series* 5(2018): 61-65

meningkatkan kesejahteraan keluarga⁷. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas ini melakukan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis, mengembangkan serta menerapkan kebijakan teknis dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan sosial. Selain itu, Dinas memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dan pelayanan umum dalam lingkup pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan sosial. Fungsi lainnya melibatkan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan kebijakan teknis, termasuk penyusunan program kerja dan anggaran guna menjaga dan mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama perempuan dan anak. Pengelolaan administrasi Aparatur Sipil Negara, termasuk manajemen aset dan sarana yang diberikan oleh negara, juga menjadi tanggung jawab Dinas ini. Selain itu, Dinas melaksanakan tugas seperti urusan rumah tangga untuk membantu masyarakat dalam menjaga kesejahteraan mereka, serta mengembangkan dan mengelola tata usaha untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, terutama perempuan dan anak. Dalam menjaga dan mendukung kesejahteraan masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, non pemerintah, dan masyarakat. Kolaborasi ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan, meningkatkan kualitas hidup, serta melindungi hak hak perempuan dan anak.

Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah merupakan dinas yang mengakomodir dari berbagai UPTD sebagai muara dari seluruh informasi terkait dengan perempuan dan anak. Hal ini terjadi dikarenakan Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah merupakan pusat informasi yang mengumpulkan informasi dari berbagai UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) yang berada di Jawa Tengah. Pengumpulan data dan monitoring dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dilakukan secara konsisten dilakukan. Dilakukannya monitoring sebagai bahan evaluasi pelayanan publik yang dilakukan oleh UPTD yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Tengah juga dihadirkan rapat evaluasi perbulannya. Hal ini dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif. Dalam rapat evaluasi bulanan, Dinas Pelayanan Publik dapat meninjau berbagai aspek, termasuk pelayanan kepada masyarakat, penggunaan anggaran, dan implementasi kebijakan. Evaluasi ini dapat membantu dinas untuk mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran telah tercapai serta mengevaluasi efektivitas strategi yang telah diimplementasikan. Selain itu, rapat evaluasi juga menjadi wadah untuk mendengar masukan dari para pelaksana lapangan atau staf terkait. Diskusi tentang permasalahan yang muncul, baik secara internal maupun eksternal, dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi kerja dan tantangan yang dihadapi. Dengan melakukan rapat evaluasi perbulan, Dinas Pelayanan Publik dapat secara proaktif mengidentifikasi potensi perbaikan, mengambil tindakan korektif, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas

⁷ Ganiem, Leila Mona. "Pemberdayaan Perempuan Miskin Kota Melalui Pendidikan." *Jurnal Aspikom* 3.2(2017): 239-255.

dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ini merupakan langkah yang strategis dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih responsif, efisien, dan berkualitas, sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Bentuk bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perempuan dan Anak ini juga dikatakan telah sangat memanfaatkan perkembangan teknologi. Selain program program seperti seminar, workshop, dan sosialisasi sosialisasi yang dilakukan dinas ini, tapi dinas ini dilakukan inovasi inovasi untuk mendukung jalannya pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Perempuan dan Anak ini. Penggunaan *website* yang dapat ditelusuri oleh semua orang dan juga berbagai pengembangan aplikasi yang diciptakan oleh Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah. Keterbukaan sistem informasi merupakan aspek kritis dalam era modern yang ditandai oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pentingnya keterbukaan sistem informasi mencakup sejumlah faktor yang melibatkan transparansi, keamanan, inovasi, dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks transparansi, keterbukaan sistem informasi memainkan peran penting dalam memastikan bahwa informasi yang dihasilkan dan diakses oleh pemerintah, organisasi, dan entitas lainnya dapat dipahami dan diperiksa dengan mudah oleh pihak yang berkepentingan. Ini membantu menciptakan akuntabilitas dan kepercayaan dari publik terhadap lembaga lembaga yang menggunakan sistem informasi. Keamanan informasi juga menjadi pertimbangan utama dalam menerapkan keterbukaan sistem informasi. Dengan menyediakan akses terbuka, penting untuk melindungi data dan informasi agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Langkah langkah keamanan yang memadai, seperti enkripsi dan pengaturan akses yang tepat, diperlukan untuk menjaga integritas dan kerahasiaan informasi yang diakses melalui sistem tersebut. Aspek inovasi juga menjadi daya dorong penting untuk keterbukaan sistem informasi. Dengan memberikan akses lebih luas terhadap data dan sumber daya, masyarakat, peneliti, dan pengembang dapat menggunakan informasi tersebut untuk menciptakan solusi baru, meningkatkan layanan, dan menghasilkan nilai tambah dalam berbagai sektor. Keterbukaan sistem informasi yang dilakukan oleh Dinas Perempuan dan Anak yang telah mengumpulkan data dari berbagai sumber UPTD yang berada di Jawa Tengah juga mendapati kemudahan untuk di akses pada website yang mereka ciptakan.

Pemerintah bersama aparatnya memiliki tanggung jawab terhadap stakeholder dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera melalui pelayanan publik. Esensi dari pemerintahan yang baik adalah pengembangan produk layanan yang efektif, efisien, dan akuntabel untuk masyarakat. Namun, menciptakan pelayanan berkualitas yang memuaskan stakeholder merupakan tantangan yang kompleks. Berbagai kendala dan faktor lainnya sering kali menyebabkan pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dinilai belum memadai dan tidak dilaksanakan dengan sepenuh hati. Banyak keluhan dari stakeholder dan media massa yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan publik masih belum mencapai tingkat optimal. Oleh karena itu, perbaikan dan peningkatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik perlu dilakukan untuk menciptakan kondisi negara yang lebih baik. Terlebih lagi, dengan adanya era otonomi daerah, desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke

pemerintah daerah seharusnya mempercepat proses pelayanan publik kepada masyarakat.

2. Beban Administratif Yang Menjadi Kendala Bagi Lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jawa Tengah

Aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan suksesnya lembaga dinas tersebut dalam menjalankan layanan administrasi dengan baik. Penyelenggara lembaga dinas dapat dianggap mampu dalam menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien apabila menerapkan administrasinya berhasil. Namun seringkali maladministrasi terjadi pada lembaga dinas pemerintahan yang dapat menjadikan adanya hambatan dan kendala dalam pengerjaan tugas. Kendala administrasi merujuk pada berbagai hambatan, rintangan, atau masalah yang muncul dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab administratif suatu organisasi atau instansi. Kendala administrasi dapat muncul dari berbagai aspek dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan tugas administratif.

a. Kendala administrasi secara general yang terjadi pada lembaga dinas pemerintahan

Kendala-kendala yang terjadi ini lah yang dapat menjadi hambatan yang mempengaruhi kinerja pelayanan publik itu sendiri. Biasanya secara general kendala-kendala ini mencakup berbagai aspek, mulai dari administrasi hingga faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas dinas tersebut. Kendala tersebut memuat antara lain: keterbatasan anggaran dan sumber daya, birokrasi yang rumit, korupsi dan etika, perubahan kebijakan, teknologi dan inovasi, dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya:

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh dinas pemerintahan adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya. Anggaran yang terbatas dapat menghambat kemampuan dinas untuk menyediakan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Sumber daya manusia yang kurang memadai juga dapat menjadi penghalang dalam mencapai tujuan pelayanan publik yang diinginkan.

2. Birokrasi yang Rumit:

Birokrasi yang kompleks dan rumit seringkali menjadi kendala dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Proses birokratis yang lambat dan berbelit-belit dapat memperlambat respon dinas pemerintahan terhadap kebutuhan masyarakat.

3. Korupsi dan Etika:

Korupsi merupakan masalah serius yang dapat merusak kredibilitas dan integritas dinas pemerintahan. Tindakan korupsi dapat muncul di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat rendah hingga tingkat tertinggi dalam hierarki pemerintahan. Penerapan etika yang buruk juga dapat merugikan reputasi dinas dan mengurangi kepercayaan masyarakat.

4. Perubahan Kebijakan:

Dinas pemerintahan seringkali dihadapkan pada perubahan kebijakan yang mendadak. Perubahan ini dapat berasal dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi atau sebagai respons terhadap perkembangan sosial dan ekonomi. Tantangan terbesar adalah bagaimana dinas dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut tanpa mengorbankan kualitas pelayanan.

5. Teknologi dan Inovasi:

Mengadopsi teknologi baru dan berinovasi dalam penyediaan layanan dapat menjadi tantangan tersendiri. Kurangnya sumber daya teknologi dan keahlian karyawan dapat membatasi kemampuan dinas untuk memanfaatkan teknologi secara efektif untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.

Kendala administrasi tidak hanya terkait dengan aspek internal organisasi, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perubahan regulasi pemerintah, dinamika pasar, atau perkembangan teknologi. Pemahaman yang baik terhadap kendala administrasi membantu organisasi untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi masalah-masalah yang mungkin timbul dalam menjalankan fungsi administratifnya. Faktor eksternal merupakan kondisi atau pengaruh dari luar organisasi yang dapat memberikan dampak atau menjadi kendala terhadap jalannya administrasi. Beberapa faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi administrasi suatu organisasi meliputi:

1. Perubahan Kebijakan Pemerintah

Perubahan kebijakan atau regulasi pemerintah dapat secara langsung mempengaruhi cara lembaga pemerintahan menjalankan tugas administratifnya. Lembaga pemerintahan harus menyesuaikan prosedur dan kebijakan internal mereka sesuai dengan perubahan yang diamanatkan oleh pemerintah.

2. Perkembangan Ekonomi

Perubahan dalam kondisi ekonomi, seperti resesi atau pertumbuhan ekonomi, dapat memengaruhi anggaran dan sumber daya yang tersedia untuk administrasi. Sehingga lembaga pemerintahan mungkin perlu menyesuaikan prioritas atau mengurangi beban administratif untuk mengatasi perubahan dalam kondisi ekonomi.

3. Dinamika Pasar

Perubahan dalam persaingan pasar atau preferensi konsumen dapat memerlukan penyesuaian strategi administratif. Sehingga lembaga pemerintah perlu beradaptasi dengan cepat untuk tetap relevan dan bersaing efektif di pasar.

4. Perubahan Teknologi

Perkembangan teknologi yang cepat dapat memerlukan investasi dan adaptasi untuk mengintegrasikan solusi teknologi dalam tugas administratif. Sehingga lembaga pemerintah perlu mengikuti tren teknologi untuk mempertahankan efisiensi dan daya saing.

b. *Kendala Dinas Perempuan dan Anak Jawa Tengah dalam Menjalankan Fungsinya Sebagai Lembaga Pemerintahan*

Hal-hal yang sebelumnya dijabarkan dapat menjadikan sebuah beban administratif tersendiri bagi lembaga pemerintahan yang dapat menjadi tantangan yang mempengaruhi efektivitas kinerja berbagai layanan yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat. termasuk Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Tengah. Arti penting administrasi pelayanan publik terletak pada kemampuannya untuk memberikan layanan yang efektif tanpa menimbulkan beban berlebihan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga pemerintahan, Dinas Perempuan dan Anak Jawa Tengah memiliki peran yang vital dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak. Namun, seperti halnya lembaga pemerintahan lainnya, Dinas Perempuan dan Anak juga dihadapkan pada berbagai kendala yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugasnya. Beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Perempuan dan Anak serta dampaknya terhadap upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta anak adalah sebagai berikut:

1. Terjadi nya cacat program

Cacat program seringkali menjadi kendala yang dialami oleh Dinas Perempuan dan Anak dalam menjalankan program kerja, cacat kerja disini dimaksudkan program yang tidak terlaksana secara sempurna karena Dinas Pemberdayaan Perempuan hanya sebagai koordinator Jawa Tengah yang membawahi 35 Dinas Kota dan Kabupaten.

2. *Miss Communication*

Hal ini terjadi akibat kurang nya prioritas di Dinas - Dinas Perempuan dan Anak Daerah dan Kota. Program yang seharusnya menjadi upaya pemerintah Dinas Perempuan dan Anak Jawa Tengah untuk menanggulangi seluruh permasalahan dan pengaduan masyarakat menjadi kurang efektif karena hal yang dirasa prioritas kurang diperhatikan oleh Dinas Dinas di Daerah dan Kota.

3. Terjadinya *server down*

Server down dapat menjadi kendala tersendiri yang diluar dari kendali Dinas Perempuan dan Anak. Sehingga tim PPID dan tim IT harus mengulangi penginputan data yang hilang di beberapa bagian supaya data yang tercantum di dalam *website* tetap *valid* dan benar sesuai pada kenyataan lapangan nya. Hal ini menjadikan bagian PPID dn IT melakukan kerja dua kali akibat data yang hilang.

c. *Upaya Penanggulangan Kendala Kendala Dinas Perempuan dan Anak Jawa Tengah*

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Jawa Tengah memiliki peran krusial dalam memastikan perlindungan, pemberdayaan, dan kesejahteraan perempuan serta anak-anak. Namun, seringkali, lembaga ini dihadapkan pada berbagai kendala administratif yang dapat memperlambat efisiensi dan efektivitasnya dalam menjalankan tugas pokoknya. Sehingga Dinas Perempuan dan Anak menanggulangi kendala kendala tersebut dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh meningkatkan kinerja dan dampak positif terhadap masyarakat.

1. Evaluasi dan Pembaruan Kebijakan Administratif

Salah satu langkah penting yang diambil oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan administratif yang berlaku. Dengan memahami kendala-kendala yang muncul, lembaga ini dapat merancang dan menerapkan perubahan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pembaruan kebijakan dapat melibatkan penyederhanaan prosedur, peningkatan transparansi, dan penyesuaian terhadap perkembangan hukum dan teknologi. Evaluasi ini biasanya disebut dengan rapat pengendalian yang terlaksana pada setiap bulannya dengan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas. Pembahasan dalam rapat pengendalian biasanya mencakup tentang *capture capture* perjalanan kesuksesan program, serta membahas tentang target advokasi target.

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak semakin memahami pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi administratif. Implementasi sistem informasi yang canggih dapat membantu dalam manajemen data, pelacakan program-program pemberdayaan, dan pengelolaan administrasi umum. Dengan teknologi yang tepat, Dinas Perempuan dan Anak dapat merampingkan proses, mengurangi kegiatan manual, dan memastikan akurasi data yang diperlukan. Dinas Perempuan dan Anak memiliki akun *Instagram* yang memuat informasi terkait program pemberdayaan, aktivitas seluruh anggota dan aktivis kantor, serta memuat seluruh informasi informasi yang *up to date*. Dinas Perempuan dan Anak juga memiliki *website* yang diperbaharui secara berkala. di dalam *website* tersebut mencakup informasi struktur keorganisasian, tugas dan fungsi seluruh anggota, beberapa layanan publik, publikasi open data dan juga penyaluran atau penyuluhan program. dalam hal ini Dinas Perempuan dan Anak menganggap bahwa sesuai *peraturan pemerintah xxx* Lembaga Pemerintahan harus memberikan transparansi kepada pihak umum dan masyarakat terkait data data yang tidak dikecualikan dan perlu ditutupi karena menyangkut privasi daya seseorang.

3. Pelibatan Masyarakat dalam Proses Administratif

Dinas Perempuan dan Anak tidak hanya berfokus pada aspek teknis administratif, tetapi juga memahami pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Mekanisme partisipatif seperti forum konsultasi publik, pertemuan kelompok diskusi, atau survei masyarakat dapat membantu Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak untuk memahami kebutuhan nyata dan menyesuaikan program-programnya secara lebih akurat.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perempuan dan Anak Jawa Tengah memiliki peran strategis dalam perlindungan, pemberdayaan, dan pengembangan perempuan serta anak-anak di wilayah Jawa Tengah. Namun, lembaga ini juga dihadapkan pada berbagai kendala administratif yang dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitasnya. Kendala tersebut mencakup keterbatasan anggaran dan sumber daya, birokrasi yang rumit, korupsi, perubahan

kebijakan, dan tantangan dalam mengadopsi teknologi baru. Upaya penanggulangan dilakukan melalui evaluasi dan pembaruan kebijakan administratif, penguatan sumber daya manusia, penerapan teknologi dan inovasi, peningkatan koordinasi dengan Dinas Daerah, serta pemeliharaan sistem teknologi informasi. Meskipun menghadapi kendala, Dinas Perempuan dan Anak Jawa Tengah terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan perlindungan serta pemberdayaan perempuan dan anak. Evaluasi secara berkala dan adaptasi terhadap perubahan menjadi kunci dalam mengatasi kendala administratif dan mencapai tujuan lembaga ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Sinambela, Lukman. 2014. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat.
- Hayat, S. (2023). *Manajemen Pelayanan Publik*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Siti Zahrok dan Ni Wayan Suarmini, "Peran perempuan dalam keluarga," *IPTEK Journal of Proceedings Series* 5(2018): 61-65
- Ganiem, Leila Mona. "Pemberdayaan Perempuan Miskin Kota Melalui Pendidikan." *Jurnal Aspikom* 3.2(2017): 239-255.
- Dekawati, I., Sanjaya, A. J., & Tamam, B. (2022). Pengaruh beban mengajar terhadap produktivitas penelitian melalui motivasi kerja. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 19(1), 33-46. <https://doi.org/10.17509/jap.v29i1.45066>
- Dwiyanto, A. (2018). *Administrasi Publik: Desentralisasi Kelembagaan Dan Aparatur Sipil Negara*. UGM PRESS.
- Hidayah, B. N., & Sudaryanti, S. (2021). Responsivitas Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dalam Memberikan Perlindungan bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak. *Wacana Publik*, 1(1), 32. <https://doi.org/10.20961/wp.v1i1.50889>
- Ikhbaluddin, I. (2020). Strategi pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menerapkan teknologi informasi pemerintahan untuk meningkatkan Tata kelola pemerintahan. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, 2(2), 41-57. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v2i2.2316>
- Kallo, K. (2023). Strategi Komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak dalam Meminimalisir Tingkat Kekerasan terhadap Perempuan Dan Anak Di Kabupaten bone. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(3), 1605-1612. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i3.1694>
- Lindawaty, D. S., Dharmaningtias, D. S., Ardiyanti, H., & Katharina, R. (2018). *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- MANDASARI, S.IP., N. (2021). Strategi pemberdayaan perempuan Di dinas pemberdayaan perempuan Dan perlindungan anak Kota sungai penuh. *JURNAL ADMINISTRASI NUSANTARA*, 4(2), 1-15. <https://doi.org/10.51279/jan.v4i2.496>

- Mustanir, A., Hendrayady, A., Kusnadi, I. H., Purnamaningsih, P. E., Irawan, B., Wismayanti, K. W., Baihaqi, M. R., Bilgies, A. F., Harianto, R. P., & Grave, A. D. (2023). *Teori Administrasi Publik*. Global Eksekutif Teknologi.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 3 tahun 2015 tentang Tata naskah dinas Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*. (2020).
- Perempuan, M. N. (2005). *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia nomor*.
- Susilo, A. B. (2010). Makna perbuatan hukum publik oleh badan atau pejabat administrasi negara Yang melanggar hukum (Suatu tinjauan yuridif menurut hukum administrasi negara). *Perspektif*, 15(4), 441. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v15i4.63>
- Winarni, F. (2015). Kendala Kultural Pemberdayaan Wanita dalam program Pembangunan. *EFISIENSI - KAJIAN ILMU ADMINISTRASI*, 6(1). <https://doi.org/10.21831/efisiensi.v6i1.3827>